

## Pelaksanaan APBD 2010 Tak Patuhi Ketentuan

PONTIANAK. Menyimak penjelasan gubernur atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalbar TA 2010 dan LHP BPK RI, tampak tergambar masih banyaknya temuan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan APBD.

"Pelanggaran itu, baik dikarenakan ketidakpatuhan atas ketentuan peraturan yang ada, maupun kelalaian atau memang kesengajaan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini harus menjadi perhatian serius gubernur," tegas H Retno Pramudya SH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar kepada Equator, Minggu (24/7).

Faktor lainnya juga, lanjut dia, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pimpinan SKPD yang bersangkutan, terhadap kinerja bawahannya, terutama menyangkut masalah pengelolaan keuangan. Legislator PPP ini juga memaparkan beberapa temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. Temuan itu seperti berkaitan masalah pendapatan yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan pada kas daerah.

Retno menjelaskan, pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tentang pendapatan daerah tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp128 juta tidak disetor ke rekening kas daerah. Uang tersebut disimpan ke rekening pribadi, yakni atas nama sekretaris dinas tersebut. Parahnya lagi, sistem keuangan seperti itu berlangsung selama tiga tahun, tanpa tindakan apapun dari kepala dinasny, apalagi dari Gubernur Kalbar.

Kemudian, kata Retno, Dispenda pada UPPD Mempawah dan UPPD Singkawang pendapatan sebesar Rp80 juta tidak disetorkan ke kas daerah. Dana tersebut dipakai



langsung untuk biaya operasional pengalihan dan pembelian kendaraan roda dua. Parahnya lagi, kendaraan tersebut tidak dicatat pada buku inventaris aset.

Belum lagi pada RSUD Dr Soedarso Pontianak, di mana penerima klaim program nasional Jamkesmas sebesar Rp6,2 miliar, Akper Sintang penerima uang kuliah dari mahasiswa sebesar Rp2,1 miliar tidak dilaporkan dan disetorkan ke kas daerah. SPP SPMA Singkawang penerima yang tidak dilaporkan dan disetorkan ke kas daerah dan dipergunakan sebesar Rp430 juta.

"Di sini menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kepatuhan atas ketentuan yang ada, sehingga begitu besar kesempatan melakukan penyimpangan tersebut. Belum lagi temuan dalam pelaksanaan belanja APBD TA 2010 di beberapa unit kerja," sesal politisi Dapil Sanggau-Sekadau ini.

Selain itu, Retno mengungkapkan, seperti pada belanja modal pada Dinas PU, pemeliharaan dan peningkatan jalan, di mana kontrak pekerjaan belum selesai, tapi sudah mengalami banyak kerusakan, sebelum penyerahan (FHO). Parahnya lagi, pembayaran pekerjaan tersebut kepada kontraktor dilakukan 100 persen, mengakibatkan berkurangnya nilai manfaat dari jalan tersebut. Menurutnya, Kepala Bidang Bina Marga tidak cermat dalam pengendalian dan pemanfaatan atas

pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, Kepala Dinas PU kurang optimal dalam melakukan pengendalian kegiatan dan pengawasannya yang merupakan tanggung jawabnya. Seperti peningkatan Jalan Siduk-Kelik, pemeliharaan berkala Jalan Kembayan-Balai Sebut, pemeliharaan Jalan Sambas, Tanjung Harapan-Tanah Hitam-Merbau, pemeliharaan Jalan Ngabang-Serimbu. "Pengerjaan jalan tersebut melanggar Kepres 80/2003," tegasnya.

Retno yang juga Sekretaris DPW PPP Kalbar ini juga menyoroti RSUD Dr Soedarso soal pembangunan Hall Multifungsi sebesar Rp1,7 miliar. Pekerjaan dibayarkan 100 persen kepada kontraktor, tetapi pekerjaan belum 100 persen selesai.

"Hal ini menunjukkan BA pemeriksaan akhir pekerjaan dibuat tidak berdasarkan keadaan sebenarnya. Bahkan atas keterlambatan itu pihak kontraktornya tidak dikenakan denda keterlambatan," ujarnya. Bukan hanya itu, Retno mengatakan, masih terjadi di Dinas Pendidikan, pekerjaan renovasi SMAN 2 Pontianak tahap satu senilai Rp1,3 miliar, sama kasusnya pekerjaan sebelum selesai tetapi sudah dibayarkan 100 persen, kontraktornya tidak dikenakan denda.

Selanjutnya di Dispenda, pembangunan gedung kantor UPPD Samsat Singkawang tahap II senilai Rp2 miliar kasusnya juga sama. (jul)